

## **Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Oleh:  
Farhan Maulana  
5160111104

Laporan Tugas Akhir ini mengenai Akuntansi Sektor Publik dilatar belakangi Pengadaan Barang Milik Daerah. Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini mengatur bahwa seluruh pelaksanaan pengadaan harus melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. SPSE merupakan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Metode pemilihan data yang digunakan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diambil merupakan data-data yang didapatkan dari wawancara dengan menghasilkan informasi yang sering terlaksana dan kajian dokumen hasil evaluasi serta lampiran data pelaksanaannya. Tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan perencanaan dan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil dari tugas akhir ini, yaitu pelaksanaan perencanaan dan pengadaan barang milik daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlaksana dari pihak terkait telah melaksanakan proses perencanaan dan pengadaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, serta dengan kesesuaian dokumen-dokumen yang digunakan.

Kata kunci: Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik daerah.

***Evaluation of the Implementation of Planning and Procurement of Regional Property at the Environment and Forestry Service of the Special Region of Yogyakarta***

Farhan Maulana  
516011104

*This Final Report is about Public Sector Accounting with the background of the Procurement of Regional Property. The enactment of Presidential Regulation Number 16 of 2018 regulates that all procurement implementation must go through the Electronic Procurement System (SPSE) and a supporting system. SPSE is a goods / service procurement application developed by the Government Goods / Services Policy Institute (LKPP). This research uses descriptive qualitative data analysis method. The data were obtained from interviews with information that is often carried out and the review of evaluation results documents and implementation data attachments. The purpose of this final project report is to evaluate whether the implementation of planning and procurement of regional property carried out by the Environment and Forestry Service of the Special Region of Yogyakarta is in accordance with the Yogyakarta Special Region Provincial Regulation Number 6 of 2018 concerning Regional Property Management and Policy Institution Regulations Government Procurement of Goods / Services Number 9 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Government Goods / Services Procurement. The results of this final project, namely the implementation of planning and procurement of regional property in the Environment and Forestry Service of the Special Region of Yogyakarta as a whole are in accordance with applicable regulations. This can be done by the related parties having carried out the planning and procurement processes in accordance with their duties and authorities, as well as with the suitability of the documents used.*

*Keywords:* Evaluation of the Implementation of Planning and Procurement of Regional Property.